



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 129/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.1/IX/2025

TENTANG

TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, perlu dibentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampun dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai sebagai Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : 41/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang TIM Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

KETIGA : Tugas Tim adalah sebagai berikut :


- a. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2024;
- b. Menuangkan evaluasi tersebut kedalam Lembar Kerja Evaluasi dan memenuhi evidennya dan di upload ke dalam Aplikasi SEMAR;
- c. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- d. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan melaporkan Laporan Hasil Evaluasi tersebut ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT. |

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

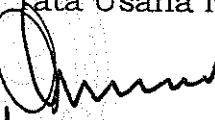
Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 129/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.1/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025

**TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

No.	Nama	Jabatan kedinasan	Jabatan tim
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua	Pembina
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Sutiyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengawas
4.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Ketua Tim
5.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Sekretaris Tim
SATKER PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG			
6.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
7.	Nora Agustina, S.Kom.	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
8.	Dhevit Miranda, A.Md.A.B	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
9.	Feven Indri Yani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Risa Setiawati, S.I.Kom.	Penata Keprotokolan	Anggota
SATKER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG			
11.	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
12.	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
13.	Dwi Indah Rosalina, S.H, M.H.	Juru Sita Pengganti	Anggota
14.	Aprilia Berlianda, S.M.	Penata Layanan Operasional	Anggota
15.	Tivri Manthiq Sibarani, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
SATKER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG			
16.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
17.	Nora Agustina, S.Kom.	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
18.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

19.	M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	Juru Sita Pengganti	Anggota
SATKER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU			
20.	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota
21.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota
22.	Aprianto, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
23.	Ade Kurniawan, S.E.	Juru Sita Pengganti	Anggota
24.	Tiara Antonisa Wielna, A.Md.A.B.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
SATKER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI			
25.	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kepala Subbagian, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
26.	Firdaus Amin, S.E., M.M.	Penata Layanan Operasional	Anggota
27.	Mitha Claudia Elsivia, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
28.	Linopa Angra Oktasona, A.Md.	Juru Sita Pengganti	Anggota
SATKER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG			
29.	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
30.	Medi Darmawansyah, S.H., M.H.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
31.	Fhareza Muhammad Gahar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
32.	Akbar Winda Nata, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah *Sp.*